



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

KPKNL KENDARI

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
DAFTAR TABEL -----	iii
DAFTAR GAMBAR -----	iii
KATA PENGANTAR -----	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF -----	v
BAB I Pendahuluan -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi -----	1
C. Isu Strategis Organisasi -----	5
D. Sistematika Laporan -----	5
BAB II Perencanaan Kinerja -----	8
A. Rencana Strategis -----	8
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 -----	11
C. Pengukuran Kinerja -----	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -----	16
A. Capaian Kinerja KPKNL Kendari -----	16
B. Realisasi Anggaran -----	47
BAB IV PENUTUP -----	49
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan -----	5
Tabel 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang -----	5
Tabel 3	Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Kendari -----	13
Tabel 4	Capaian Indikator Kinerja Utama 2025 -----	16
Tabel 5	Realisasi dan capaian Kinerja Indeks Integritas -----	17
Tabel 6	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Integritas-----	18
Tabel 7	Realisasi dan capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang-----	19
Tabel 8	Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang---	20
Tabel 9	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara -----	20
Tabel 10	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK -----	21
Tabel 11	Realisasi Pokok Lelang -----	22
Tabel 12	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Pokok Lelang-----	22
Tabel 13	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara-----	24
Tabel 14	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Penurunan nilai saldo piutang negara -----	24
Tabel 15	Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan -----	25
Tabel 16	Realisasi Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi-----	26
Tabel 17	Realisasi dan capaian kinerja Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan -----	27
Tabel 18	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan-----	27
Tabel 19	Realisasi dan capaian kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) -----	29
Tabel 20	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)-----	29
Tabel 21	Realisasi Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara --	31
Tabel 22	Realisasi Tingkat kualitas layanan penilaian-----	32
Tabel 23	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tingkat kualitas layanan penilaian -----	33
Tabel 24	Realisasi dan capaian kinerja Persentase produktivitas lelang -----	34
Tabel 25	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase produktivitas lelang --	35
Tabel 26	Realisasi dan capaian kinerja Indeks Kualitas Kinerja Anggaran-----	36
Tabel 27	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Kinerja Anggaran -----	36
Tabel 28	Realisasi dan capaian kinerja Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa -	38
Tabel 29	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa -----	39
Tabel 30	Realisasi dan capaian kinerja Persentase pengembangan kompetensi pegawai-----	41
Tabel 31	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase pengembangan kompetensi pegawai-----	42
Tabel 32	Realisasi dan capaian kinerja Indeks penanganan permasalahan hukum -----	44
Tabel 33	Realisasi dan capaian kinerja Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)-----	45
Tabel 34	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko -----	47
Tabel 35	Penyerapan Anggaran KPKNL Kendari Tahun 2025 -----	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kerja KPKNL Kendari -----	3
Gambar 2 Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Kendari Tahun 2024 -----	12

KATA PENGANTAR



Taufiq Istianto (Kepala KPKNL Kendari)

Laporan Kinerja (Lakin) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Lakin KPKNL Kendari merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi tahun 2025. Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan Lakin yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi.

Penyusunan Lakin ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029.

Selama tahun 2025, KPKNL Kendari telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis KPKNL Kendari tahun 2025 yang diterjemahkan ke dalam Kontrak Kinerja KPKNL Kendari yang memuat 18 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Di tahun 2025, KPKNL Kendari berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113.83%. KPKNL Kendari akan terus meningkatkan kinerjanya dengan sebaik mungkin sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi bagi Indonesia umumnya, dan Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi pertanggungjawaban kami pada masyarakat serta sebagai pendorong peningkatan kinerja KPKNL Kendari dimasa yang akan datang.

Kendari, 28 Januari 2026
Kepala KPKNL Kendari



Ditandatangani secara elektronik
Taufiq Istianto



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Kendari Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Kendari selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Kendari Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Kendari atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Kendari menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Kendari selama tahun 2025.

Visi DJKN adalah Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan. Dalam mencapai visi tersebut KPKNL Kendari mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Kendari mempunyai empat misi yaitu (1) Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial; (2) Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara; (3) Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; (4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam mencapai visi dan misi, KPKNL Kendari menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2025-2029 yaitu Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara, Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum, Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Sasaran Strategi DJKN Tahun 2025 yaitu Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, Layanan penilaian dan advisori

yang profesional dan relevan, Layanan lelang yang modern dan tepercaya, Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Untuk mencapai sasaran strategi Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial telah ditentukan 5 (lima) arah kebijakan yaitu (1) Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional; (2) Pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang akuntabel; (3) Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional; (4) Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara; (5) Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk mencapai sasaran strategi Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan telah ditentukan 1 (satu) arah kebijakan yaitu Penguatan peran strategis layanan penilaian dan advisori untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah.

Untuk mencapai sasaran strategi Layanan lelang yang modern dan tepercaya telah ditentukan 1 (satu) arah kebijakan yaitu layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional.

Untuk mencapai sasaran strategi Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif telah ditentukan 3 (tiga) arah kebijakan yaitu (1) Organisasi dan SDM yang optimal; (2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; (3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2025 dihasilkan 18 IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar dengan Kepala KPKNL Kendari.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 sangat memuaskan yaitu dari total 18 IKU, 17 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113.83%.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di DJKN telah berjalan dengan baik. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Untuk itu, KPKNL Kendari akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Kendari sebagai organisasi berkinerja tinggi (*high performance organization*) semakin meningkat.



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 135 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Kendari yang mulai berdiri pada bulan Juli 2017 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

KPKNL Kendari merupakan unit eselon III (tiga) di lingkungan DJKN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Sulseltrabar yang berkedudukan di Jalan Made Sabara Nomor 6, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. KPKNL Kendari memiliki wilayah kerja yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kota dan Kabupaten, diantaranya Kota Kendari; Kota Bau-bau; Kabupaten Buton; Kabupaten Buton Selatan; Kabupaten Buton Tengah; Kabupaten Buton Utara; Kabupaten Konawe; Kabupaten Konawe Kepulauan; Kabupaten Konawe Selatan; Kabupaten Konawe Utara; Kabupaten Kolaka; Kabupaten Kolaka Timur; Kabupaten Kolaka Utara; Kabupaten Muna; Kabupaten Muna Barat; Kabupaten Bombana; dan Kabupaten Wakatobi, dengan sebaran peta sebagai berikut:

Gambar 1
Wilayah kerja KPKNL Kendari



Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Kendari memiliki 4 (empat) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 TAHUN 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 TAHUN 2025, KPKNL Kendari memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi :

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- j. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KPKNL Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit eselon IV dan 2 Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 3) Seksi Piutang Negara;
- 4) Seksi Hukum dan Informasi;
- 5) Seksi Kepatuhan Internal.
- 6) Jabatan Fungsional Pelelang; dan
- 7) Jabatan Fungsional Penilai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Kendari didukung oleh para pegawai dari berbagai bidang keahlian antara lain keuangan, hukum, ekonomi dsb. Adapun komposisi pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, golongan, dan jumlah tenaga fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	SI	DIII	DI	SLTA	SLTP	
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	-	-	1
2	Sub Bagian Umum	-	1	3	1	-	-	5
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	1	3	-	-	-	-	4
4	Jabatan Fungsional Penilai	1	2	-	-	-	-	3
5	Seksi Piutang Negara	-	1	-	-	1	-	2
6	Jabatan Fungsional Lelang	-	4	-	-	-	-	4
7	Seksi Hukum dan Informasi	1	3	1	-	-	-	5
8	Seksi Kepatuhan Internal	-	2	-	-	-	-	2
Jumlah		4	16	4	1	1	-	26

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Unit Kerja	Golongan Ruang										Jml
		IVb	IVa	IIId	IIIc	IIIf	IIIa	IIId	IIIf	IIb	IIa	
1	Kepala Kantor	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sub Bagian Umum	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	5
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	4
4	Jabatan Fungsional Penilai	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3
5	Seksi Piutang Negara	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
6	Jabatan Fungsional Lelang	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	4
7	Seksi Hukum dan Informasi	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	5
8	Seksi Kepatuhan Internal	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		-	2	4	7	6	3	-	4	-	-	26
		2		20				5				
		7%		76%				19%				

C. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Kendari memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut.

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamankan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari asset administration (penatausahaan aset) menjadi asset manager (manajer aset)


menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.

3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
4. Komitmen DJKN dalam mencapai misi bahwa pengelolaan kekayaan negara dapat menjadi salah satu proses bisnis di Kementerian Keuangan.
5. Hasil revaluasi BMN tahun 2018-2019 dijadikan dasar untuk mengukur nilai BMN secara up to date dalam skala nasional di Indonesia.
6. Pengembangan teknologi di dalam organisasi untuk menciptakan suatu yang lebih praktis dan efisien khususnya dalam upaya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
7. KPKNL Kendari memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.
8. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Kendari Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.
2. Bab I Pendahuluan
Menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Bab II Perencanaan Kinerja
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun 2025.
5. Bab IV Penutup
Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02. Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025-2029, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Kendari pada tahun 2025-2029 adalah

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi Manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan pelayanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Kendari telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra KPKNL Kendari, terdapat sebelas sasaran, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, adalah:
 - a. Indeks Integritas
 - b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal, adalah:
 - a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
 - b. Persentase realisasi pokok lelang
 - c. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa, adalah:
 - a. Indeks kepuasan pengguna layanan
 - b. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penerapan tata kelola aset yang efektif, adalah:
 - a. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan
 - b. Persentase evaluasi kinerja BMN
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, adalah:
 - a. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara
 - b. Tingkat kualitas layanan penilaian
 - c. Persentase produktivitas lelang
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif, adalah:
 - a. Indeks kualitas kinerja anggaran
 - b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
 - c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, adalah:
 - a. Indeks penanganan permasalahan hukum
 - b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)
8. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif, adalah:
 - Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Kendari. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Kendari yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Menyempurnakan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan BMN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020,
 - b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah
 - a. Penguatan Jabatan Fungsional Pelelang.
 - b. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
 - c. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD.
 - d. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang representatif dan marketable.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah:
 - a. akuntabel, penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembanding.
 - b. Efisien, pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.
4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan birokrasi dan pelayanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah.
 - a. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.

- b. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
- c. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
- d. Penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.
- e. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.

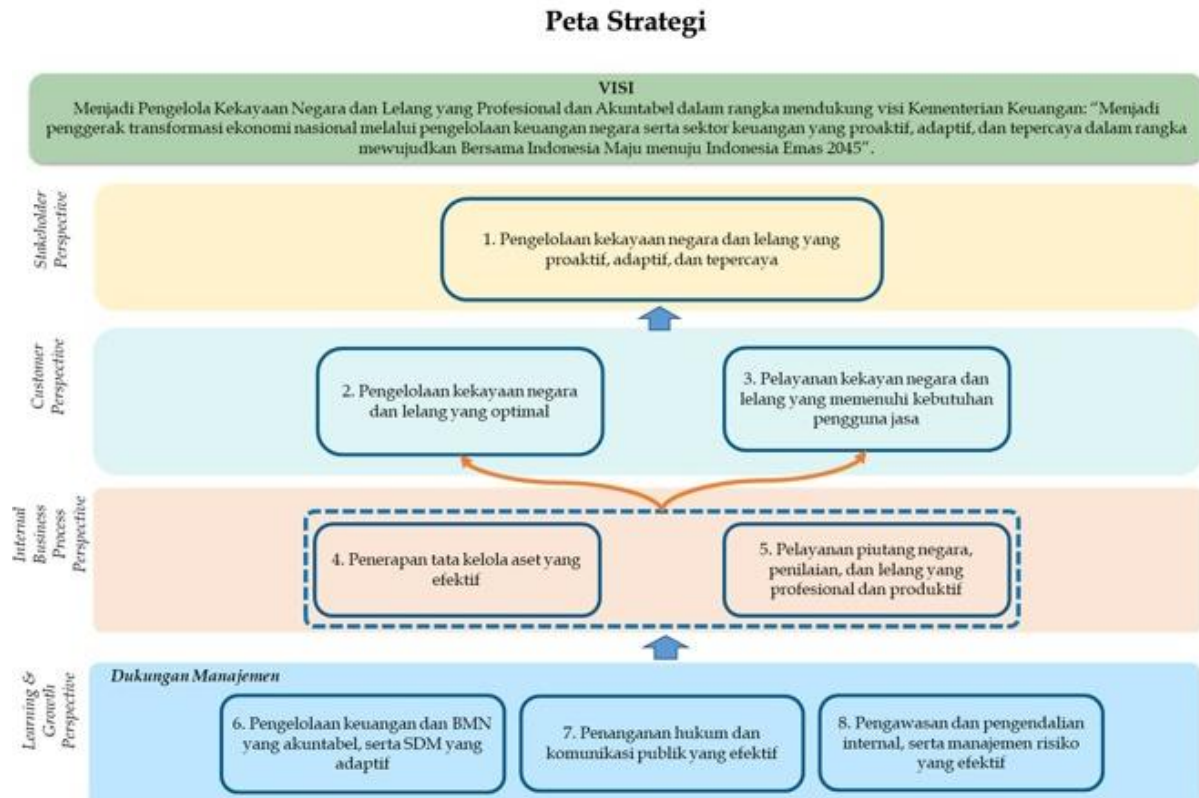
B. Ringkasan/lkhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Kendari. Sasaran Strategis KPKNL Kendari Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Kendari. Peta Strategi KPKNL Kendari Tahun 2025 memuat delapan sasaran strategis yaitu

- (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
- (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
- (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
- (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif;
- (5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
- (6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
- (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
- (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Gambar 2
Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Kendari Tahun 2025



Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2025 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Kendari terdapat 8 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3
Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Kendari

Kode	IKU	Polarisasi	VIC	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Basaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d	s.d						
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif, adaptif, dan terpercaya	-	-							111,55	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,32	19,00%	57,58%	105,32	105,32	60,64	111,55
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	134,17%	14,00%	42,42%	134,17	120,00	50,91	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-	-							104,75	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	103,11%	19,00%	36,54%	103,11	103,11	37,67	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	95,16%	19,00%	36,54%	95,16	95,16	34,77	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	138,35%	14,00%	26,92%	138,35	120,00	32,31	112,38
3	Relayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-	-							120,00	
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	97,66	14,00%	50,00%	126,83	120,00	60,00	
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	100,19	14,00%	50,00%	135,39	120,00	60,00	
Internal Process Perspective (26%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-	-							106,27	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipkatkan	Max	P/M	100,00%	102,24%	14,00%	50,00%	102,24	102,24	51,12	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	110,30%	14,00%	50,00%	110,30	110,30	55,15	
5	Relayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-	-							120,00	113,14
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	158,57%	14,00%	33,33%	158,57	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	112,04%	14,00%	33,33%	160,05	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	120,00%	14,00%	33,33%	150,00	120,00	40,00	
Learning and Growth Perspective (26%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-	-							120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	97,20%	14,00%	33,33%	121,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-	-							115,29	118,43
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	110,59	14,00%	50,00%	110,59	110,59	55,29	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	113,75	14,00%	50,00%	142,19	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-	-							120,00	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	97,79	14,00%	100,00%	122,23	120,00	120,00	
NKO											113,83

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Kendari berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;

4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

- 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Maximize

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- 2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Minimize

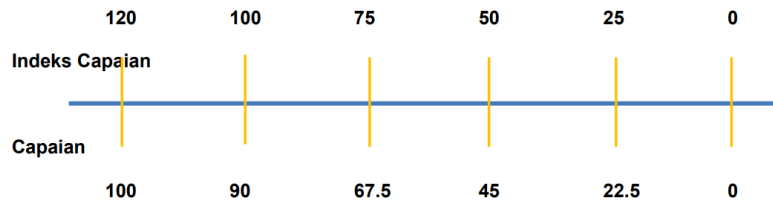
$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

- 3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Stabilize

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Dengan grafik sebagai berikut:



In = Indeks capaian

In-1 = Indeks capaian dibawahnya

In-1 = Indeks capaian diatasnya

Ca = Capaian awal

Ca = Realisasi/target x 100%

Cn = Capaian dengan ketentuan :

Capaian dengan ketentuan :

a. Apabila Realisasi > Target, maka:

$$Cn = 100 - (Ca - 100), \text{ dimana } Ca \text{ maksimum adalah } 200\%$$

b. Apabila Realisasi < Target, maka :

$$Cn = Ca$$

Cn-1 = Capaian dibawahnya

Cn+1 = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPKNL Kendari

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2025 KPKNL Kendari telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dibawah ini :

Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Utama 2025

Kode	IKU	Polarisasi	W/C	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Persepsive
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan kelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	-								111,55	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,32	19,00%	57,58%	105,32	105,32	60,64	111,55
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	134,17%	14,00%	42,42%	134,17	120,00	50,91	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan kelang yang optimal	-								104,75	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	103,11%	19,00%	36,54%	103,11	103,11	37,67	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	95,16%	19,00%	36,54%	95,16	95,16	34,77	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	138,35%	14,00%	26,92%	138,35	120,00	32,31	112,38
3	Pelayanan kekayaan negara dan kelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120,00	
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	97,66	14,00%	50,00%	126,83	120,00	60,00	
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	100,19	14,00%	50,00%	135,39	120,00	60,00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								106,27	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipkaskan	Max	P/M	100,00%	102,24%	14,00%	50,00%	102,24	102,24	51,12	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	110,30%	14,00%	50,00%	110,30	110,30	55,15	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan kelang yang profesional dan produktif	-								120,00	113,14
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	158,57%	14,00%	33,33%	158,57	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	112,04%	14,00%	33,33%	160,05	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	120,00%	14,00%	33,33%	150,00	120,00	40,00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-								120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	97,20%	14,00%	33,33%	121,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-								115,29	118,43
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	110,69	14,00%	50,00%	110,69	110,69	55,29	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (FPID)	Max	P/M	80,00	113,75	14,00%	50,00%	142,19	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-								120,00	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	97,79	14,00%	100,00%	122,23	120,00	120,00	
NKO										113,83	

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kendari Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three KPKNL Kendari sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:

- a. Indeks Integritas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian Keuangan dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik. Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Target KPKNL Kendari pada IKU Indeks Integritas adalah 100 dengan realisasi tahunan sebesar 105,32 sehingga capaian IKU sebesar 105,32.

Tabel 5
Realisasi dan capaian kinerja
Indeks Integritas

K-Three	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							Pol/KP
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Max/ TLK
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	100	100	100	105,32	
Capaian	100	100	100	100	100	100	105,32	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	100	105,32	

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Integritas beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja
Indeks Integritas

Uraian	2023	2024	2025
Target	88,67	89,17	100
Realisasi	89,17	92,44	105,32
Capaian	100,56	103,67	105,32

- b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1). PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN Aset)
 - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,
 - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan
- 2). PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3). PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian

- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- e. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f. Perijinan Balai Lelang dan PL II
- g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
- h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II
- i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Target KPKNL Kendari pada IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah Rp30.358.542.000 dengan realisasi tahunan sebesar Rp40.732.216.904,90 sehingga capaian IKU sebesar 134,17% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Realisasi dan capaian kinerja
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara
dan lelang

K-Three	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	P ol/ K P
Target	1,516,970,000	4,554,070,000	4,554,070,000	9,110,970,000	9,110,970,000	30,358,542,000	30,358,542,000	
Realisasi	2,846,026,259	24,010,150,018.90	24,010,150,018.90	30,358,540,923.90	30,358,540,923.90	40,732,216,904.90	40,732,216,904.90	Ma x/ TL K
Capaian	187.61%	527.22%	527.22%	333.21%	333.21%	134.17%	134.17%	
Nilai Kinerja	187.61%	527.22%	527.22%	333.21%	333.21%	134.17%	134.17%	

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari PNBPN Aset, PNBPN Piutang Negara dan PNBPN Lelang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8

Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Uraian	PNBP Aset	PNBP Lelang	PNBP PN	PNBP
Target	24.602.165.000,00	5.708.000.000,00	48.377.000,00	30.358.542.000,00
Realisasi	34.910.774.270,00	5.736.740.946,00	84.701.688,90	40.732.216.904,90
Capaian	141,90%	100,50%	175,09%	134,17%

2. Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama:

a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Target SBSK KPKNL Kendari Tahun 2025 adalah 102 NUP (100%) dengan realisasi 103,11% dengan tingkat capaian 103,11%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9

Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
K-Three	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
T/R	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	205.56%	100.56%	100.56%	102.04%	102.04%	103.11%	103.11%	Max/ TLK
Capaian	205.56%	100.56%	100.56%	102.04%	102.04%	103.11%	103.11%	
Nilai Kinerja	205.56%	100.56%	100.56%	102.04%	102.04%	103.11%	103.11%	

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Uraian	2023	2024	2025
Target	68	71,5%	100%
Realisasi	82,48	91,60%	103,11%
Capaian	121,29%	128,11%	103,11%

b. Persentase realisasi pokok lelang

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBPN Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Target pokok lelang KPKNL Kendari Tahun 2025 adalah Rp221.900.000.000,00 dengan rincian target PL I Rp55.650.000.000,00 sedangkan target Lelang Pegadaian Rp166.250.000.000,00 sepanjang tahun 2025 realisasi yang diperoleh dari pokok lelang PL I Rp79.325.301.268,00 sedangkan realisasi pokok lelang yang berasal dari Pegadaian Rp131.843.082.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Realisasi Pokok Lelang

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
K-Three	Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Po I/K P
Target	22.190.000.000,00	66.570.000.000,00	66.570.000.000,00	133.140.000.000,00	133.140.000.000,00	221.900.000.000,00	221.900.000.000,00	
Realiasi PL 1	19.789.554.459,00	35.932.534.299,00	35.932.534.299,00	56.364.404.276,00	56.364.404.276,00	79.325.301.268,00	79.325.301.268,00	
Realisasi Pegadaian	28.241.200.800,00	49.547.590.000,00	49.547.590.000,00	97.069.289.700,00	97.069.289.700,00	131.843.082.900,00	131.843.082.900,00	Ma x/ TL K
Capaian	48.030.755.259,00	85.480.124.299,00	85.480.124.299,00	53.433.693.976,00	153.433.693.976,00	211.168.384.168,00	211.168.384.168,00	
Nilai Kinerja	48.030.755.259,00	85.480.124.299,00	85.480.124.299,00	53.433.693.976,00	153.433.693.976,00	211.168.384.168,00	211.168.384.168,00	

Pencapaian IKU Realisasi Pokok Lelang tidak tercapai disebabkan target Pokok Lelang pada Pegadaian tidak tercapai, dikarenakan adanya perubahan struktur penerimaan pada Pengadaian yang berpengaruh terhadap capaian Pokok Lelang.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Pokok Lelang beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Pokok Lelang

Uraian	2023	2024	2025
Target	221.437.000.000	221.660.000.000	221.900.000.000,00
Realisasi	240.381.851.968	215.622.928.469	211.168.384.168,00
Capaian	108,56%	97,28%	95,16%

c. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDP/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara memiliki target sebesar Rp.1.897.321.000,00 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 2.625.032.923,00. Capaian IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada tahun 2025 adalah 138,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

K-Three Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	200,000,000	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,897,321,000	1,897,321,000	Max/ TLK
Realisasi	1,360,834,561	1,840,811,672.63	1,840,811,672.63	1,897,320,966.63	1,897,320,966.63	2,625,032,923.00	2,625,032,923.00	
Capaian	680.42%	368.16%	189.73%	189.73%	189.73%	138.35%	138.35%	
Nilai Kinerja	680.42%	368.16%	189.73%	189.73%	189.73%	138.35%	138.35%	

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Penurunan nilai saldo piutang negara beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja
Persentase Penurunan nilai saldo piutang negara

Uraian	2023	2024	2025
Target	3.645.035.203,00	1.673.000.000,00	1.897.321.000,00
Realisasi	4.347.589.572,00	4.188.082.028,99	2.625.032.923,00
Capaian	119,27%	250,33%	138,35%

3. Sasaran strategis pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian

- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan

Hasil Survei dituangkan dalam perhitungan berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Capaian IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar 97,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan

Uraian	Indeks kepuasan pengguna layanan
Target	77
Realisasi	97,20
Capaian Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik

b. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait Jafung Pelelang dan pengelolaan piutang negara.

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan stakeholders dalam hal pemahaman substansi/materi yang

disampaikan melalui audensi dan konsultasi/kunjungan/sosialisasi /workshop/Focus Group Discussion atau metode lainnya yang dilaksanakan.

IKU ini lebih mengutamakan kualitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan.

Efektitas edukasi dan komunikasi diukur melalui kuisioner yang memuat 4

Indikator yaitu:

- 1) tingkat pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi,
- 3) kualitas narasumber, dan
- 4) kualitas tempat pelaksanaan.

Capaian IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar 97,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Realisasi Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

K-Three	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target JPL	74	74	74	74	74	74	74	MAX/ AVG
Target PN	74	74	74	74	74	74	74	
Realisasi JPL	120	85,01	85,01	120	120	93,44	93,44	
Realisasi PN	100	99,36	99,36	93,14	93,14	90,53	90,53	
Capaian	110	92,19	92,19	106,57	106,57	91,99	100,19	
Nilai Kinerja	110	92,19	92,19	106,57	106,57	91,99	100,19	

4. Sasaran strategis Penerapan tata kelola aset yang efektif, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan

Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan penswertipkatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). Target IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan pada KPKNL Kendari Tahun 2025 adalah sebesar 134 bidang tanah dan dapat direalisasikan sebanyak 137 bidang tanah dengan tingkat capaian sebesar 102,24%.

Tabel 17
Realisasi dan capaian kinerja
Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/ KP
Target	134	134	134	134	134	134	134	Max / TLK
Realisasi	8	55	55	90	90	137	137	
Capaian	5,97%	41,04%	41,04%	67,16%	67,16%	102,24%	102,24%	
Nilai Kinerja	5,97%	41,04%	41,04%	67,16%	67,16%	102,24%	102,24%	

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja
Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Uraian	2023	2024	2025
Target	358	155	134
Realisasi	439	168	137
Capaian	122,63%	108,39%	102,24%

b. Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan

mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Dengan Formula:

Komponen A= (Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya / Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya)

Komponen B= (Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker / Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker)

Pada tahun 2025, target portofolio yang dibebankan kepada KPKNL Kendari adalah komponen A=498 NUP dan komponen B=25 rekomendasi. Realisasi

komponen A=501 NUP dan realisasi komponen B=38 rekomendasi dengan tingkat capaian realisasi IKU 110.30%.

Tabel 19
Realisasi dan capaian kinerja
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif								
K-Three	Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/ KP
Target Komponen A	75	249	249	374	374	498	498	Max / TLK
Target Komponen B	4	13	13	19	19	25	25	
Realisasi Komponen A	84	346	346	452	452	501	501	
Realisasi Komponen B	6	18	18	38	38	38	38	
Capaian	116%	120%	120%	120%	120%	110,30%	110,30%	
Nilai Kinerja	116%	120%	120%	120%	120%	110,30%	110,30%	

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Uraian	2023 (NUP & rekomendasi)	2024 (NUP & rekomendasi)	2025 (NUP & rekomendasi)
Target	167 dan 3	125 dan 5	498 dan 25
Realisasi	167 dan 5	125 dan 10	501 dan 38
Capaian	113.33%	120.00%	110.30%

- Sasaran strategis Pelayanan piutang Negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

- 1). Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a). Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b). Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c). Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 2). Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a). Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b). Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c). Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 3). Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
 - a). Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b). Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target di KPKNL Kendari Tahun 2025 sejumlah 7 Berkas Piutang Negara Diselesaikan, dengan realisasi sebesar 11,10 BKPN dengan tingkat capaian realisasi IKU 158.57%.

Tabel 21
Realisasi Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

K-Three	Pelayanan piutang Negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/ KP
Target	1	2	2	4	4	7	7	Max /TL K
Realisasi	2,20	3,40	3,40	4,50	4,50	11,10	11,10	
Capaian	220%	170%	170%	112,50%	112,50%	158,57%	158,57%	
Nilai Kinerja	220%	170%	170%	112,50%	112,50%	158,57%	158,57%	

b. Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional diukur melalui:

1). Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN.

Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

2). Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP)

3). Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85.

Target 2025: 80% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang di SIP

KPKNL Kendari dalam hal pemenuhan IKU Tingkat kualitas layanan penilaian mempunyai target tahun 2025 sebesar 70 dan berhasil mencapai realisasi sebesar 112,04 dengan tingkat capaian IKU sebesar 160,05%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22
Realisasi Tingkat kualitas layanan penilaian

K-Three	Pelayanan piutang Negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	PoI /KP
Target komponen A	111,11	109,78	109,78	110,46	110,46	113,88	113,88	Max / TLK
Realisasi komponen A	111,11	109,78	109,78	110,46	110,46	113,88	113,88	
Target komponen B	5	9	9	14	14	11	11	
Realisasi komponen B	5	9	9	14	14	11	11	
Target komponen C	36	1	1	11	11	20	20	
Realisasi komponen C	36	1	1	11	11	20	20	
Capaian	112%	111,71%	111,71%	111,70%	111,70%	112,04%	112,04%	
Nilai Kinerja	112%	111,71%	111,71%	111,70%	111,70%	112,04%	112,04%	

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja
Tingkat kualitas layanan penilaian

Uraian	2023	2024	2025
Target	70	70	70
Realisasi	88,14	105	112,04
Capaian	125,91%	150%	160,05%

c. Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Persentase produktivitas lelang diukur melalui 2 komponen yaitu:

- a). Rata-rata capaian Lot Lelang Laku (40%)
- b). Persentase Frekuensi Lelang (60%)

Pada tahun 2025 target Persentase produktivitas lelang ditetapkan sebesar 80% dan realisasi sebesar 120% dengan tingkat capaian IKU sebesar 150%.

Tabel 24
Realisasi dan capaian kinerja Persentase produktivitas lelang

K-Three		Pelayanan piutang Negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							Po/KP
		Persentase Produktivitas Lelang							
T/R		Q1	Q2	Smt 1	Q3	S.d. Q3	Q4	Y24	MAX/ LK
a	Rata-rata capaian Lot Lelang Laku (40%)								
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela	-	33,33%	33,33%	44,44%	44,44%	38,10%	38,10%	
	% Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela	-	25,00%	25,00%	33,33%	33,33%	28,57%	28,57%	
	Jumlah realisasi lot lelang laku	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Jumlah lot lelang	0,00	4,00	4,00	6,00	6,00	7,00	7,00	
	Target	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	
	Capaian Lot Laku Lelang noneksekusi wajib	123,33%	155,84 %	155,84 %	134,66 %	134,66 %	141,09 %	141,09 %	
	% Lot Laku Lelang noneksekusi wajib	67,83%	85,71%	85,71%	74,06%	74,06%	77,60%	77,60%	
	Jumlah realisasi lot lelang laku	97,00	12,00	12,00	217,00	217,00	388,00	388,00	
	Jumlah lot lelang	143,00	14,00	14,00	293,00	293,00	500,00	500,00	
	Target	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan	196,08%	303,03%	303,03%	141,18%	141,18%	220,22%	220,22%	
	% Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan	9,80%	15,15%	15,15%	7,06%	7,06%	11,01%	11,01%	
	Jumlah realisasi lot lelang laku	10,00	15,00	15,00	42,00	42,00	98,00	98,00	
	Jumlah lot lelang	102,00	99,00	99,00	595,00	595,00	890,00	890,00	
	Target	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
	Capaian Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan	173,33%	266,67%	266,67%	238,46%	238,46%	228,57%	228,57%	
	% Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan	43,33%	66,67%	66,67%	59,62%	59,62%	57,14%	57,14%	
	Jumlah realisasi lot lelang laku	13,00	2,00	2,00	31,00	31,00	44,00	44,00	
	Jumlah lot lelang	30,00	3,00	3,00	52,00	52,00	77,00	77,00	
	Target	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	

b	Persentase Frekuensi Lelang (60%)	17,08%	13,95%	13,95%	75,88%	75,88%	120,00%	120,00%	
	Jumlah realisasi frekuensi lelang	131,00	107,00	107,00	582,00	582,00	923,00	923,00	
	Target frekuensi lelang	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	
	REALISASI IKU	58,25%	56,37%	56,37%	93,53%	93,53%	120,00%	120,00%	

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase produktivitas lelang beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase produktivitas lelang

Uraian	2023	2024	2025
Target	80%	89%	80%
Realisasi	105%	134,83%	120%
Capaian	131,25%	151,49%	150%

6. Sasaran strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks kualitas kinerja anggaran

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7). Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

PMK SBK terbaru tahun 2025 PMK 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025 Target IKU Indeks kualitas kinerja Anggaran sebesar 100% dan realisasi 120% dengan tingkat capaian 120%.

Tabel 26
Realisasi dan capaian kinerja
Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

K-Three	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/ KP
a. Realisasi IKPA (TW I s.d TW III)	100	120	120	100	100			Max/ TLK
b. Realisasi NKA:						99,07	99,07	
Realisasi IKPA (50%)						100,00	100,00	
Realisasi SMART (50%)						98,13	98,13	
Realisasi IKU	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks kinerja Anggaran beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja
Indeks Kinerja Anggaran

Uraian	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%
Realisasi	102,39%	120%	120%
Capaian	102,39%	120%	120%

b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Tata kelola pengadaan barang dan jasa di tahun 2025 mengukur komponen sebagai berikut:

- a). Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
- b). Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

- Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu: Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan, Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN.

1). Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan (Bobot 50%)

$$\text{Formula : } \frac{\text{jumlah nilai komitmen PDN}}{\text{jumlah nilai rencana pengadaan}} \times 100\%$$

Target Triwulan I Komitmen PDN sebesar 30%

Target Triwulan II s.d. IV Komitmen PDN sebesar 70%

Perhitungan realisasi pada Triwulan I s.d. IV

2). Pelaksanaan PDN atas Komitmen (Bobot 50%)

$$\text{Formula : } \frac{\text{jumlah nilai pelaksanaan PDN}}{\text{jumlah nilai komitmen PDN}} \times 100\%$$

Target Triwulan III Pelaksanaan PDN sebesar 30%

Target Triwulan IV Pelaksanaan PDN sebesar 70%

Perhitungan realisasi pada Triwulan III s.d. IV

- Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100)

Pembobotan:

SIRUP : 60%

E-Tendering : 10%

E-Purchasing Katalog : 10%

Non E-Tendering dan Non E-Purchasing : 10%

E-Kontrak : 10%

Realisasi:

capaian > 85% = realisasi indeks 120

capaian 80%-85% = realisasi indeks 100

capaian 50% - 79% = capaian sesuai dengan realisasi

capaian < 50% = realisasi indeks 0

Target IKU pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dan realiasi sebesar 120% dengan tingkat capaian IKU 120%.

Tabel 28
Realisasi dan capaian kinerja
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

K-Three	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/K P
A. Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	Max/ TLK
1) Capaian Komponen Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan (Bobot 50%)	-	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	
Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Jumlah nilai komitmen PDN				1.687.076.000	1.687.076.000	1.718.034.000	1.718.034.000	
Jumlah nilai rencana pengadaan				1.687.076.000	1.687.076.000	1.718.034.000	1.718.034.000	
2) Capaian Pelaksanaan PDN atas Komitmen (Bobot 50%)				120,00	120,00	120,00	120,00	
Pelaksanaan PDN atas Komitmen				77,59%	77,59%	97,97%	97,97%	
Jumlah nilai pelaksanaan PDN				1.308.948.930	1.308.948.930	1.652.891.943	1.652.891.943	
Jumlah nilai komitmen PDN				1.687.076.000	1.687.076.000	1.687.076.000	1.687.076.000	
B. Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan	-	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	
Realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan	0	0	0	104%	104%	108%	108%	
Indeks Tata Kelola Pengadaan	0,00%	0,00%	0,00%	83,38%	83,38%	99,20%	99,20%	
SIRUP (60%)				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
E-Tendering (0%)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
E-Purchasing Katalog (20%)				50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	
Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (20%)				66,91%	66,91%	96,00%	96,00%	
E-Kontrak (0%)				0	0,00%	0,00%	0,00%	

*TW I s.d TW III dihitung secara self assesment **TW IV dihitung oleh ITKP dari LKPP							
Target	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00	92,00	92,00
REALISASI IKU	-	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Uraian	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	120%	120%
Capaian	100%	120%	120%

c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Pengembangan kompetensi pegawai di tahun 2025 mengukur komponen sebagai berikut:

- a). Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator
- b). Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

▪ Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh

Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

- 1). Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
- 2). Tingkat Sinergi Antar Generasi

- Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

- 1). Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

- 2). Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Pembanding penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 80% dan realisasi sebesar 97,20% dengan tingkat capaian 121,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Realisasi dan capaian kinerja Persentase pengembangan kompetensi pegawai

K-Three		Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
A. Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00	118,00	
1) Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental (Unsur A)	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,00	
a. Nilai Pelaksanaan Kegiatan	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	115,00	
b. <i>Feedback</i> Peserta						120,00	120,00	

2) Tingkat Sinergi Antar Generasi (Unsur B)		100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Max/TLK
Nilai Kegiatan		100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
B. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan	36,67%	96,80%	96,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai	20,83%	96,00%	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1) Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP	5,00	24,00	24,00	25,00	25,00	26,00	26,00	
2) Jumlah Pegawai Aktif	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	26,00	26,00	
Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1) Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan	3,00	8,00	8,00	19,00	19,00	22,00	22,00	
2) Jumlah Pegawai terpanggil	3,00	8,00	8,00	19,00	19,00	22,00	22,00	
REALISASI IKU	28,33%	70,40%	70,40%	86,00%	86,00%	98,00%	97,20%	

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase pengembangan kompetensi pegawai beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Kendari adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Uraian	2023	2024	2025
Target	100%	90%	80%
Realisasi	120%	120%	97,20%
Capaian	120%	133,33%	121,50%

7. Sasaran strategis Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:
 - a. Indeks penanganan permasalahan hukum
Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:
 - 1). Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan

2). Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

- Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Bobot komponen: 80%

Target komponen: 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025

- Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Bobot komponen: 20%

Target komponen: 90

Putusan adalah putusan atas:

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 100 dan realisasi sebesar 110,59 dengan tingkat capaian IKU 110,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32
Realisasi dan capaian kinerja Indeks penanganan permasalahan hukum

K-Three		Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							Pol/K P
		Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	
.	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan	111,03	110,59	110,59	116,67	116,67	110,59	110,59	Max/ TLK
	Nilai Indeks Komponen A	94,38	94,00	94,00	99,17	99,17	94,00	94,00	
	Hasil penjumlahan seluruh Nilai Indeks dari setiap perkara komponen A	755,00	470,00	470,00	595,00	595,00	470,00	470,00	
	Jumlah perkara komponen A	8,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	
	Target Komponen A	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
b.	Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap	-	111,11	111,11	133,33	133,33	-	-	
	Nilai Indeks Komponen B	-	100,00	100,00	120,00	120,00	-	-	
	Hasil penjumlahan seluruh Nilai Indeks dari setiap perkara komponen B	-	100,00	100,00	120,00	120,00	-	-	
	Jumlah perkara komponen B	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	
	Target Komponen B	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
REALISASI IKU		111,03	110,69	110,69	120,00	120,00	110,59	110,59	

- b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)
Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 80 dan realisasi sebesar 113,75 dengan tingkat capaian IKU sebesar 110,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33
Realisasi dan capaian kinerja Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

K-Three		Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/K P
a	Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan	-	-		-		-		Max/T LK

	Jumlah Indeks Pemberitahuan Tertulis	-	-		-		-	
	Jumlah Permintaan	-	-		-		-	
b	Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik	120,00	120,00		120,00		120,00	
	Indeks Ketepatan Waktu	120,00	120,00		120,00		120,00	
c	Ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website	110,00	100,00		110,00		110,00	
	Komponen Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik	100,00	80,00		100,00		100,00	
	Jumlah realisasi informasi publik yang telah dipublikasikan (50%)	50,00	5,60		1,50		1,50	
	Target pemutakhiran informasi publik (50%)	50,00	7,00		1,50		1,50	
	Komponen Ketepatan Waktu	120,00	120,00		120,00		120,00	
	Indeks Ketepatan Waktu	120,00	120,00		120,00		120,00	
	REALISASI IKU	115,00	110,00	112,50	115,00	113,33	115,00	113,75

8. Sasaran strategis Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko.

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 80 dan realisasi sebesar 97,79 dengan tingkat capaian IKU sebesar 122,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34
Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

T/R	Q1	Q2	Sm .1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/K P
K-Three	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							

a	Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi (30%)	92,80	97,89	97,89	98,56	98,56	98,99	98,99	Max/ TLK
b	Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai (30%)	100,00	99,12	99,12	99,43	99,43	99,42	99,42	
c	Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%)	94,63	94,64	94,64	93,80	93,80	95,66	95,66	
	REALISASI IKU	95,69	96,96	96,96	96,92	96,92	97,79	97,79	

B. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai seluruh kegiatan KPKNL Kendari pada tahun 2025, telah dialokasikan DIPA (setelah direvisi) sebesar Rp2.719.572.000 Dilihat dari nilai capaian

program pelaksanaan penggunaan DIPA, secara umum KPKNL Kendari tidak mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan kegiatan kantor.

Tabel 35

Penyerapan Anggaran KPKNL Kendari Tahun 2025

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu Awal	Pagu setelah Blokir dan Relaksasi 2025	Realisasi per 31 Des 2025	% Realisasi
Belanja Barang (52)	Rupiah Murni	1.976.808.000	1.791.481.000	1.780.114.430	99.37%
	PNBP	70.423.000	53.345.000	49.820.062	93.39%
Belanja Modal (53)	Rupiah Murni	1.014.506.000	874.746.000	857.362.985	98.01%
	PNBP	-	-	-	
Total		3.061.737.000	2.719.572.000	2.687.297.477	98.81%

Adapun gambaran target dan realisasi kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 meliputi :

- a. Rencana kegiatan;
- b. Perhitungan keluaran riil;
- c. Perhitungan hasil efisiensi;
- d. Penyerapan Anggaran atas pagu netto;
- e. Capaian Keluaran riil;
- f. Konsistensi Rencana Penarikan Dana;
- g. Laporan Capaian Output

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Kendari Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029 yang mengacu pada rencana strategis tahun 2025-2029.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Kendari pada tahun 2025 secara umum dapat dikatakan baik karena seluruh IKU sebanyak 17 (tujuh belas) IKU KPKNL Kendari berwarna hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,83%.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang diterapkan oleh KPKNL Kendari adalah :

1. Melakukan kerjasama dan kolaborasi yang sinergis antara KPKNL dan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sehingga target dapat tercapai.
2. Melakukan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Kendari.
3. Selalu menjaga kualitas layanan sesuai dengan janji layanan KPKNL Kendari.
4. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, sharing knowledge agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
5. Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. Koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara KPKNL dengan para pemangku kepentingan;
 - b. Peningkatan self awareness Satuan Kerja terkait dengan optimalisasi Barang Milik Negara, termasuk dalam peningkatan PNBPN dari pengelolaan BMN;
6. Terkait pelayanan Penilaian kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. Penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembandingan; dan
 - b. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.
7. Terkait Pengurusan Piutang Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:

- a. melakukan pendekatan secara persuasif kepada debitur/Penanggung Hutang agar tetap melunasi/mengangsur hutangnya;
 - b. melakukan penggalian potensi piutang negara/daerah terus ditingkatkan kepada penyerah piutang; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak BPN untuk mengetahui letak barang jaminan khususnya tanah dan bangunan, meminta pendampingan Penyerah Piutang dalam pelaksanaan Penyitaan.
8. Terkait Lelang kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
- a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang representatif dan marketable.
9. Selalu berupaya untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Segala yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama antara KPKNL Kendari, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Dalam upaya menjaga komitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan seluruh jajaran di lingkungan KPKNL Kendari.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Kendari ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal di atasnya maupun semua jajaran di lingkungan KPKNL Kendari. Akhir kata “Tiada gading yang tak retak”, KPKNL Kendari dengan kerendahan hati menerima saran/masukan yang konstruktif untuk perbaikan menuju tercapainya visi dan misi DJKN tercinta.

Kendari, 28 Januari 2026
Kepala KPKNL Kendari



Ditandatangani secara elektronik
Taufiq Istianto

LAMPIRAN



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN
BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 5/WKN.15/2025

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan review akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Kendari 30 Januari 2025
Kepala KPKNI Kendari



Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq Istianto



DAFTAR RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1.1 Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	11	1
		1.2 Hasil lelang Obyek Persetujuan penjualan BMN lebih tinggi dari nilai limit (<i>upside risk</i>)	6	14
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2.1 Optimalisasi Penggunaan BMN <i>Underutilized</i> Tidak Terlaksana Sesuai Rencana	11	5
		2.2 Adanya Pembatalan Lelang	11	5
		2.3 Piutang negara yang di setor rendah	18	5
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3.1 Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti	11	5
		3.2 Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen	11	5
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1 BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	11	2
		4.2 Evaluasi Kinerja BMN Tidak Dapat Diimplementasikan Secara Efektif	9	5
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5.1 Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	24	9
		5.2 Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan profesional	11	1
		5.3 Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata	11	5
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6.1 <i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi	11	1
		6.2 Tidak tercapainya target output yang telah ditetapkan	11	5
		6.3 Pelaksanaan pengerjaan konstruksi/ renovasi yang terlambat/ tidak sesuai jadwal/ ketentuan/ kontrak	11	1
		6.4 Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan/ Banyak terjadi pengunduran diri diklat	9	5

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7.1 Putusan Pengadilan Kalah	10	1
		7.2 Ketidaktepatan Waktu Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN	10	5
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8.1 Awareness terkait kewajiban kinerja pegawai yang belum optimal	9	5
		8.2 Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan	11	5

Kendari, 30 Januari 2025
Kepala KPKNL Kendari



Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq Istianto





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-12/WKN.15/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Visi

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Indeks integritas	89.17%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5%
		2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86.5%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)	100%
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	82%
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%
8	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
9	Komunikasi publik yang efektif	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		9b-CP	Deviasi data PNBPF fungsional DJKN	10%
		9c-N	Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	100%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

Program/Kegiatan 2024

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp467,568,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi Rp25,628,000
2. Pengelolaan Aset Rp441,940,000

Program:

Program Dukungan Manajemen Rp1,872,461,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp20,307,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Rp1,815,929,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp25,325,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Rp10,900,000

Kendari, [@TanggalIND]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,
Tenggara, dan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Kendari



Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq Istianto



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89.17%	89.17%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71.5%	71.5%
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	-	86.5%	86.5%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	89%	89%	86%	86%	82%	82%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Deviasi data PNBP fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9c-N	Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	30%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Kendari, [@TanggaIND]

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari



Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq Istianto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Persentase realisasi pokok lelang	Lelang UMKM	Nilai Hasil Lelang ProdukUMKM	Januari - Maret	Q1 Inventarisasi Terhadap Pelaku UMKM, Q2: Pemberian Edukasi Kepada Pelaku UMKM tentang Lelang dan Inventarisasi Pelaku UMKM yang Ikut Lelang, Q3: Inventarisasi Pelaku UMKM yang Ikut Lelang, Pelaksanaan dan Monitoring Lelang, Q4: Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Lelang	Q1 Daftar Pelaku UMKM. Q2: Daftar Pelaku UMKM yang di Edukasi & Survei Tingkat Pemahaman Hasil Edukasi & Daftar Pelaku UMKM yang Mengajukan Lelang, Q3: Daftar Pelaku UMKM yang Mengajukan Lelang. Jumlah Frekuensi Lelang	Q1 s.d. Q4	1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari	40,000,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



						UMKM. Jumlah Pokok Lelang. Hasil Laporan Monitoring PelaksanaanLe lang., Q4: Hasil Laporan Monitoring Pelaksanaan Lelang. Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Kendari, [@TanggaIND]

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari



Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq Istianto



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Taufiq Istianto		NAMA	Wibawa Pram Sihombing
NIP	19770409 199602 1 001		NIP	19760906 199903 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina (IV/a)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	89.17%	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan	86.5%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



		pengelolaan BMN		
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	Penerima Layanan
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	Penerima Layanan
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)	100%	Proses Bisnis
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	82%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	89%	Proses Bisnis
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	Proses Bisnis
8	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]



11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>		
2	Akuntabel			
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>		
3	Kompeten			
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan</p>		



PERILAKU KERJA		
		upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Taufiq Istianto

19770409 199602 1 001

Kendari, [@TanggalIND]

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing

19760906 199903 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	26 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89.17%	89.17%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71.5%	71.5%
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	-	86.5%	86.5%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	89%	89%	86%	86%	82%	82%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
7a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Deviasi data PNBPF fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9c-N	Tingkat Penguatan Manajemen BMN dan Pengadaan	30%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggaIND]



	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
	11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									

Kendari, [@TanggalIND]

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Taufiq Istianto

19770409 199602 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing

19760906 199903 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]





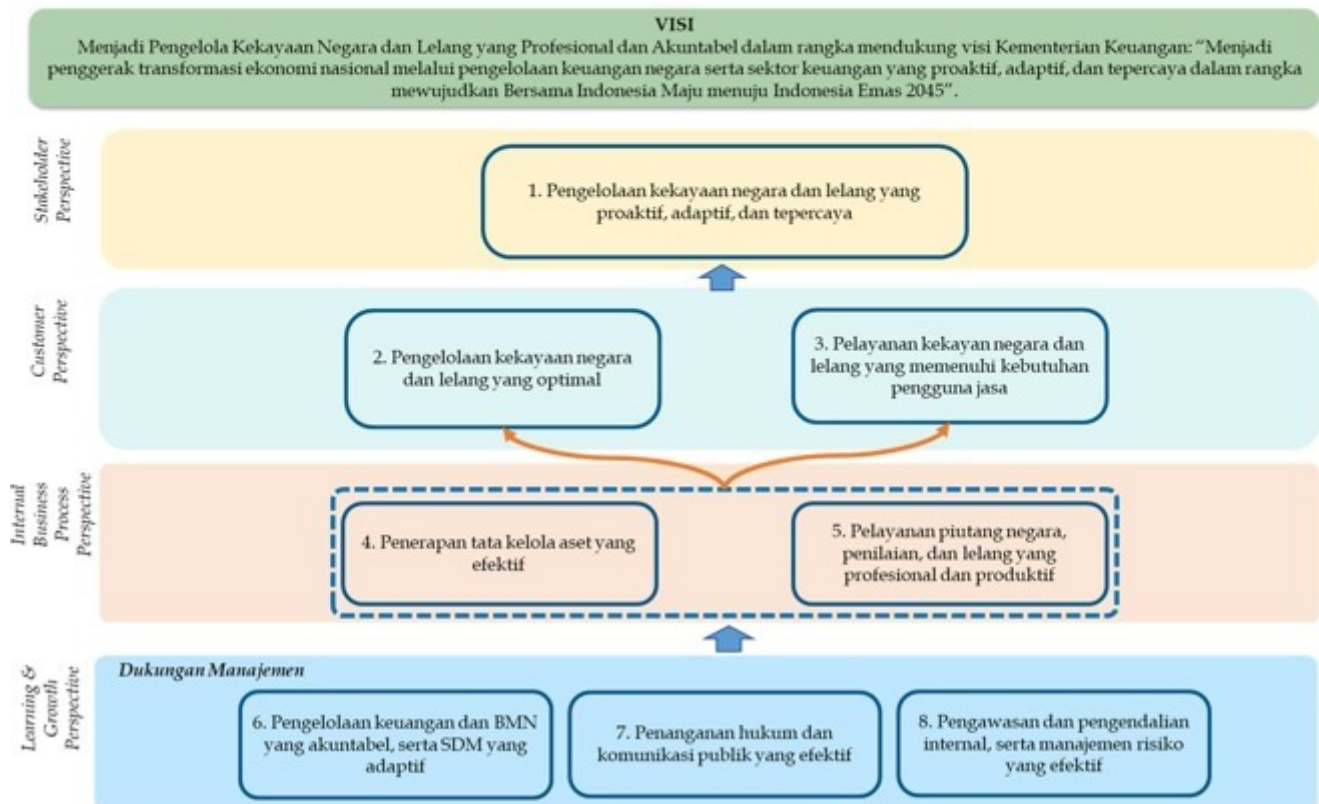
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/WKN.15/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (15,19 M)
		1b-CP	Indeks integritas	100
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (221,9 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1,757 M)
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Kegiatan

Anggaran

Rp491,517,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp27,558,000
2. Pengelolaan Aset	Rp463,959,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp2,245,451,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp30,000,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp34,853,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp10,900,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp2,169,698,000

Kota Kendari, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,
Tenggara, dan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Kendari



Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq Istianto



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (15,19 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (221,9 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (1,757 M)
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Kendari, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Kendari



Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq Istianto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Kendari, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari



Ditandatangani Secara Elektronik
Taufiq Istianto



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Taufiq Istianto		NAMA	Wibawa Pram Sihombing
NIP	19770409 199602 1 001		NIP	19760906 199903 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina (IV/a)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (15,19 M)	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (221,9 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1,757 M)	Penerima Layanan
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Kota Kendari, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Taufiq Istianto
19770409 199602 1 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	23 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (15,19 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (221,9 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (1,757 M)
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Kota Kendari, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Taufiq Istanto
19770409 199602 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025

